

# PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATLINMAS DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Julio Alessandro Nahak

NPP. 31.0787

*Asdaf Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [julionahak8@gmail.com](mailto:julionahak8@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Acer, M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The number of social security personnel in TTS Regency is considered to be quite large, namely 6,650 personnel, divided equally into 25 sub-districts and villages, but it was found that with the large number of violations of public order and community protection that occurred, only 10% contributed Satlinmas to participate in solving this problem, while 90% is resolved by Satpol PP. Purpose: to describe the implementation of the duties and functions of social security services in villages/sub-districts and to understand the government's efforts to help optimize the implementation of the duties and functions of social security services in TTS Regency. Method: This research method uses qualitative research to explain the problems that occur in more depth based on the quality theory of successful policy implementation from George Edward III (1995) through data collection techniques in the form of direct and online interviews, observation and documentation. Results/Findings: The implementation of the duties and functions of Satlinmas in TTS Regency was assessed from 4 indicators, of which 3 indicators were able to be fulfilled even though they were not optimal, including: adequate resources, a fairly good disposition of Satlinmas in following up on directions, and an organizational structure that was adequate in clarifying the duties and functions of Satlinmas, while communication indicators have not been met regarding the clarity and consistency of information conveyed by Satlinmas to the public. The government has made various efforts to overcome obstacles, such as increasing incentives and operational costs as well as providing basic disciplinary training and education for community service members. Conclusion: The implementation of the duties and functions of the security services in TTS Regency has gone quite well, but problems and obstacles are still found so that special attention is needed from the government to optimize the performance of the security services.*

**Keywords:** *Implementation of Duties and Functions, Community Protection Unit, Subdistrict/Village*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Adanya jumlah personil satlinmas di Kabupaten TTS dianggap cukup banyak yaitu sebanyak 6.650 personil yang terbagi seimbang tiap kelurahan dan desa sebanyak 25 personil, namun ditemukan bahwa dengan banyaknya pelanggaran Trantibum dan Linmas yang terjadi hanya 10% kontribusi satlinmas untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut sedangkan 90% diselesaikan oleh Satpol PP. **Tujuan:** untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di desa/kelurahan serta mengetahui upaya pemerintah dalam membantu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di Kabupaten TTS. **Metode:** Metode

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan lebih mendalam berdasarkan teori kualitas keberhasilan implementasi kebijakan dari George Edward III (1995) melalui teknik pengambilan data berupa wawancara langsung maupun daring, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di Kabupaten TTS dinilai dari 4 indikator yang diantaranya 3 indikator mampu terpenuhi walaupun belum optimal antara lain: sumberdaya yang cukup memumpuni, disposisi sikap satlinmas yang cukup baik dalam menindaklanjuti arahan, dan struktur organisasi yang cukup memadai dalam memperjelas tugas dan fungsi satlinmas, sedangkan indikator komunikasi belum terpenuhi terkait dengan kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan oleh satlinmas kepada masyarakat. Adapun berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan seperti meningkatkan insentif dan biaya operasional serta mengadakan pelatihan dan pendidikan dasar disiplin bagi satlinmas. **Kesimpulan:** Pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di kabupaten TTS sudah berjalan cukup baik namun masih ditemukan masalah dan hambatan sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja satlinmas tersebut.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Satuan Pelindungan Masyarakat, Kelurahan/Desa

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perlindungan terhadap masyarakat merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari ancaman, dan gangguan dari pihak manapun. Untuk itu, pemerintah membentuk sebuah perangkat daerah yang bertujuan untuk menjaga ketertiban di masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, yang dikenal dengan sebutan Satuan Polisi Pamong Praja (Hamudy, 2014)

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tiga tugas utama yakni menegakkan peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta menjamin perlindungan masyarakat, sehingga dalam mendukung pelaksanaan peraturan yang dimaksud, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP tentunya tidak bergerak secara sendirian namun melibatkan kalangan masyarakat yang telah menjalani seleksi secara administrasi dan memenuhi syarat sehingga dinyatakan lulus, menjalankan pendidikan dan pelatihan disiplin terkait 2 penertiban umum, yang biasa disebut dengan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas (Gunawan, 2015).

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) bahwa dengan ini kepala daerah wajib membentuk Satuan Tugas Linmas tingkat kota/kabupaten dan kecamatan yang salah satu dari tugas Satgaslinmas ialah membantu memberdayakan Satlinmas ditingkat Desa/Kelurahan. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9) bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dengan tugas dan fungsi utamanya adalah membantu menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan bagi masyarakat dengan skala tertentu.

Pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas merupakan upaya pemerintah untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban pada tingkat kelurahan/desa sehingga lebih terkendali dan teratur, adapun pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, atau tindakan yang dilakukan secara teratur maupun terarah (Yeri A, 2017), sedangkan tugas dan fungsi adalah hal yang penting dan wajib di laksanakan oleh sektor pemerintahan dan harus dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi pemerintah (Suparjiyanta, 2014).

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten yang telah membentuk Satlinmas terlebih dahulu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan konfirmasi awal yang diperoleh dari data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan bahwa pada tahun 2023 jumlah Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 6.950 Personil dengan pembagian 25 personil tiap desa/kelurahan yang didalamnya terbentuk 3 regu yang disesuaikan dengan kondisi atau wilayah yang ada di lapangan, yakni regu pengamanan, regu kesiapsiagaan, dan regu kewaspadaan dini. Jumlah Satlinmas yang sudah terdata ini memiliki jumlah yang tidak sedikit, apabila dilihat dari luas wilayah 3.955,36 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 465.970,00 jiwa (2022) seharusnya hal ini mampu menjadi suatu kelebihan bagi pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menyelenggarakan Trantibum dan Linmas khususnya di desa/kelurahan.

Adapun berdasarkan data Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum Satpol PP Kabupaten TTS diketahui bahwa tingkat pelanggaran trantibum di TTS berkisar tahun 2021 sampai 2023 dapat dikatakan cukup banyak dengan beberapa sampel data pelanggaran Trantibum mencakup berbagai macam kasus seperti, penemuan anak sekolah yang berpesta miras, anak sekolah yang bolos sekolah dan melakukan tawuran, parkir kendaraan umum secara sembarangan, penggunaan tototar untuk keperluan non-pejalan kaki, penanganan odgj yang mengganggu masyarakat, hingga konflik antara masyarakat dan gangguan trantibum dan linmas lainnya. Namun pada faktanya, dari berbagai macam kasus pelanggaran trantibum tersebut diketahui bahwa lebih dari 90% penanganannya ditangani oleh Satpol PP dan hanya sebagian kecil kasus yang ditangani oleh Satlinmas sebagai salah satu aparat perlindungan masyarakat yang melekat langsung pada desa/kelurahan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 1.1. Data Pelanggaran Trantibum dan Linmas Beserta Penanganannya oleh Satpol PP dan Satlinmas Tahun 2021-2023**

(Sumber: diolah oleh penulis, 2024)

Berangkat dari kondisi problematik yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kinerja satlinmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu aparat keamanan serta untuk mengetahui mengapa Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum bisa bekerja secara optimal serta kehadirannya yang kurang dirasakan oleh masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki konsep yang sama terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas. Penelitian pertama (Kunasih & Pramono, 2018) menggunakan teori Partisipasi dari Conyers (1991: 154-155) untuk menjelaskan optimalisasi peran satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, adapun hasil analisis didapatkan bahwa sarana dan prasarana sangatlah mempengaruhi optimalisasi peran satlinmas itu sendiri seperti perlengkapan seragam, alam keamanan, dan alat transportasi, namun ditemukan bahwa satlinmas di kelurahan ini masih sangat minim sehingga menjadi salah satu hambatan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja mereka untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Penelitian kedua (Wokas, 2022) menggunakan teori dari Jim Ife (1995:182) untuk menjelaskan pemberdayaan satlinmas melalui sistem keamanan lingkungan, adapun hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dinilai sudah berjalan dengan baik namun mengalami kendala berupa sumber daya yang tersedia, sehingga pemerintah ikut serta berupaya dengan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan melakukan penjagaan dan patroli serta koordinasi dengan Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (POLRI). Penelitian Ketiga (Aji, 2022) menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1990) meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, adapun hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sudah berjalan dengan baik dimana Satpol PP mampu memberikan himbauan dan larangan yang dapat diindahkan oleh masyarakat, sumber dayanya terus ditingkatkan oleh internal Satpol PP Konawe Selatan, Sikap mengindahkan perintah atasan terlaksana dengan baik, dan juga struktur birokrasi mulai dari SOP hingga dasar hukum yang jelas. Penelitian keempat (Bhaskara & Mursyidah, 2023) menggunakan pemberdayaan menurut Nugroho (2008), adapun hasil analisis menunjukkan bahwa Satlinmas Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dinilai telah berjalan dengan baik dengan adanya akses, partisipasi, control, dan manfaat yang dilakukan pemerintah, namun yang masih menjadi hambatan yaitu biaya operasional yang dianggarkan masih kurang mencukupi dalam pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dengan penyediaan sumber daya, selain itu insentif yang didapatkan masih kurang selama 3 tahun kebelakangan. Dan Penelitian kelima (Lestari, 2021) menunjukkan bahwa keberadaan Satlinmas masih memiliki banyak persoalannya, di antaranya yaitu mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas dimana sampai kini belum ada regulasi baru yang mengatur Satlinmas, adapun regulasi yang ada sudah terlalu uzur dan tidak bisa menangkap perkembangan zaman. Selanjutnya, rumusan konsep dan tugas pokok dan fungsi Satlinmas tumpang tindih dengan institusi lain, adapun citra Satlinmas di masyarakat

semakin memudar dan cenderung dilecehkan. Dan terakhir penggabungan Satlinmas ke dalam Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat karena beda filosofi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aji, 2022), dimana secara teori yang digunakan sama namun lokasi penelitian yang dilakukan berada berbeda yaitu di Kabupaten Timor Tengah Selatan, adapun karena satlinmas memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada tingkat kelurahan/desa maka penulis memilih lokasi penelitian yang lebih mengkhususkan pada perbandingan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas pada desa yang paling terjauh dari perkotaan yaitu Desa Nunfutu dan juga kelurahan yang paling dekat dengan perkotaan yaitu Kelurahan Nonohonis dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas Kabupaten TTS dan hambatan-hambatan yang dialami. Adapun 4 penelitian lainnya memiliki perbedaan pisau analisis untuk memahami pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di desa/kelurahan serta mengetahui upaya pemerintah dalam membantu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan data yang lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga mampu menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas pada desa/kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Simangunsong, 2017). Adapun peneliti bertindak selaku instrumen utama untuk meneliti sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, dimana hal ini sesuai dengan kalimat “*Research as key instrument*” (Cresswell, 2016).

Penulis pengumpulan data melalui proses wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan kepada unsur penyelenggara pemerintahan yang berkaitan langsung dengan penelitian tanpa melalui perantara, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan pada informan yang tidak mudah untuk ditemui sehingga harus menggunakan perantara (Arifin, 2012). Adapun teknik pemilihan informan yaitu *purposive-sampling* dimana teknik ini mengarah pada pemilihan informan dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian ini sehingga mampu memberikan informasi yang terbaik agar mampu mencapai tujuan penelitian yang ingin didapat (Sugiyono, 2015).

Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data dengan mengolah data-data mentah yang didapatkan dalam bentuk tabel dan gambar, lalu hasil analisis disajikan berupa tabel maupun gambar yang dijelaskan secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan yaitu berupa diterapkan atau tidaknya kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Creswell, 2013).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tujuan penelitian yang pertama untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas pada desa/kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dijabarkan berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan George C. Edward III (1990) dalam (Suparno, 2017)

meliputi: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Organisasi. Sedangkan pada tujuan penelitian kedua ini akan melihat dari sudut pandang pemerintah dalam upaya membantu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas pada desa/kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didasarkan pada hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang terjadi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten TTS Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun desa/kelurahan yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Nunfutu dan Kelurahan Nonohonis, dengan tujuan untuk membandingkan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas pada desa dan kelurahan.

### **3.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satlinmas pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan**

#### **1. Komunikasi**

Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana informasi dari pemerintah, yang disampaikan oleh Satlinmas dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas atau tidak, serta melihat sejauh mana konsistensi Satlinmas dalam memberikan informasi kepada masyarakat tanpa merubah dari isi perintah tersebut.

- 1) Kejelasan Informasi, Satlinmas sebagai perpanjangan tangan perangkat desa/kelurahan belum mampu untuk menyampaikan informasi yang didapatkan kepada masyarakat, sehingga penyampaian lebih banyak dilakukan oleh perangkat desa/kelurahan itu sendiri untuk mencegah adanya ketidakjelasan informasi yang diterima masyarakat. Penyampaian informasi ini belum mampu untuk dilakukan oleh satlinmas karena tidak adanya rasa tanggungjawab terhadap tugas yang seharusnya dijalankan serta sarana dan prasarana seperti papan informasi, pengeras suara, dan alat komunikasi lainnya yang tidak tersedia sehingga menyebabkan ketidakmampuan satlinmas untuk menjalankan tugas tersebut.
- 2) Konsistensi Informasi, pada Kelurahan Nonohonis terjadinya penurunan konsistensi informasi pada saat informasi disampaikan oleh satlinmas dan diterima masyarakat dari yang sebelumnya 100% menjadi 40% informasi yang diterima. Sedangkan, untuk Desa Nunfutu mengalami penurunan konsistensi informasi sejak informasi dari pemerintah kabupaten ditindaklanjuti oleh perangkat desa sehingga informasi yang tersampaikan kepada masyarakat pun jauh mengalami penurunan konsistensi hingga 40% saja.

#### **2. Sumber Daya**

Indikator kedua dapat dinilai berdasarkan 4 aspek yakni 1) Aspek Jumlah SDM; 2) Aspek Kualitas SDM; 3) Aspek Anggaran Biaya; dan 4) Aspek Indikator Sarana Prasarana, hal ini ditujukan untuk melihat kesiapan anggota satlinmas dari segi sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban didalam lingup masyarakat.

- 1) Jumlah sumber daya manusia, pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten TTS memiliki pembagian jumlah anggota satlinmas yang sama yaitu 25 personil, namun pada kenyataannya dilapangan dari jumlah yang tertera tersebut tidak semuanya aktif menjalankan tugasnya dilapangan. Pada Kelurahan Nonohonis hanya 13 personil yang dinilai aktif sedangkan 12 personil tidak aktif, dan pada Desa Nunhutu hanya 10 personil yang aktif sedang 15 personil tidak aktif, hal ini disebabkan karena data keanggotaan yang tidak diperbaharui dimana ada personil yang telah meninggal dan pindah domisili, selain itu juga tidak adanya pembentukan

- satgaslinmas tingkat kabupaten yang seharusnya harus terbentuk untuk melakukan pembinaan keanggotaan satlinmas.
- 2) Kualitas SDM, dilihat dari tingkat pendidikan sebagai syarat perekrutan sebagai anggota Satlinmas yaitu minimal lulusan Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, namun kenyataannya masih ditemukan beberapa anggota satlinmas di Kelurahan Nonohonis sejumlah 3 orang dan di Desa Nunfutu sejumlah 9 orang hanya lulusan SD, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat tentang transparansi perekrutan Satlinmas yang berdampak pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dilapangan, hal ini dikarenakan jumlah penanganan dari kasus yang ditangani oleh Satlinmas tidak berbanding lurus dengan jumlah personil Satlinmas.
  - 3) Anggaran pembiayaan, berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 pada pasal 28 huruf e membahas terkait hak yang di dapatkan oleh Satlinmas, disebutkan bahwa Satlinmas memiliki hak mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ditemukan bahwa anggaran pembiayaan satlinmas berasal dari dua sumber yaitu pemerintah daerah berupa biaya operasional kelurahan/desa (situasional) dan dana insentif dari APBD Kab. TTS sebesar Rp. 500.000,- , serta dari kegiatan mitra dengan berbagai organisasi pemerintah lainnya seperti KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya berupa biaya operasional kegiatan (situasional). Hal ini masih dirasa kurang untuk menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama, sehingga banyak anggota satlinmas yang memiliki pekerjaan sampingan seperti menjadi kuli bangunan, pedagang, ojek, dan lain sebagainya dan berdampak pada keterlambatan penanganan pada tugas yang diberikan bahkan tidak terlaksananya tugas tersebut.
  - 4) Sarana dan prasarana, pada aspek ini ditemukan bahwa sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di Kelurahan Nonohonis dan Desa Nunfutu masih sangat minim seperti tidak adanya pos jaga dan jumlah pakaian dinas lapangan yang tidak sesuai dengan jumlah personil satlinmas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Data Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satlinmas**  
**Di Kelurahan Nonohonis dan Desa Nunfutu Kabupaten TTS**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		Kel. Nonohonis	Desa Nunfutu
1	Pos Jaga Kelurahan	-	-
2	Pos Ronda Malam	-	-
3	1 Set Pakaian Dinas Lapangan Satlinmas	9	7
4	Pentungan Karet <i>letter</i> T	9	4
5	Kotak P3k	1	-
6	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1	-
7	Handy Talky (HT)	-	-

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

### 3. Disposisi

Indikator disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada sikap atau mentalitas yang dimiliki satlinmas dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dilapangan. Terkait dengan sikap Satlinmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan dinilai dari sudut pandang pemerintah sebagai

pembuat kebijakan dalam hal ini Lurah/Kades, Staf Kelurahan atau Staf Desa, dan dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang merasakan sikap Satlinmas.

- 1) Sudut pandang pemerintah, sebagian besar memberikan respon positif bahwasannya satlinmas cukup tanggap dan baik dalam menjalankan tugas yang diberikan sehingga beberapa kegiatan kelurahan dan desa dapat berjalan, disisi lain kehadiran mereka juga cukup membantu selama pelaksanaan beberapa tugas dari pemerintah yang sarasanya kepada masyarakat. Namun , masih juga ditemukan dalam beberapa kegiatan satlinmas tidak dilibatkan karena tidak adanya respon untuk memenuhi arahan tersebut sehingga digantikan dengan perangkat kelurahan/desa.
- 2) Sudut pandang masyarakat, memberikan respon yang cukup tidak baik perihal bahwasannya masyarakat menyatakan beberapa kali penyampaian informasi dari kelurahan atau desa terkait kegiatan pemerintahan seperti layanan pemerintah tidak disampaikan oleh Satlinmas kepada masyarakat, sehingga masyarakat member tanggapan bahwa sikap pelaksana tugas dari Satlinmas hanya melihat kondisi dan situasi artinya disaat kondisi yang menguntungkan satlinmas akan ikut terlibat seperti kegiatan pemilu, pilkada ataupun pilkades yang memiliki anggaran khusus untuk anggota satlinmas.

#### 4. Struktur Organisasi

Indikator ini mengacu pada tata kelola sebuah sistem birokrasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pada indikator ini dinilai berdasarkan sejauhmana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten TTS dalam menyediakan struktur birokrasi yang jelas seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi pedoman satlinmas dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan.

Pemerintah Kabupaten TTS dalam menyediakan SOP Satlinmas memiliki beberapa kekurangan seperti landasan hukum sebagai legalitas satlinmas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah masyarakat, dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Ketersediaan Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan**

No	Jenis Landasan Hukum	Keterangan
1	Surat Keputusan Bupati Terakit Pembentukan Satlinmas Berdasarkan Regu Satlinmas	Tidak Ada
2	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan	Tidak Ada
3	Surat Keputusan Satpol PP terkait Standar Operasional Prosedur Satlinmas	Tidak Ada
4	Peraturan Bupati terkait Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan	Tidak Ada
5	Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Pengukuhan Satlinmas	Ada

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Surat Keputusan Satpol PP terkait Standar Operasional Prosedur Satlinmas yang seharusnya dimiliki oleh Satlinmas guna menunjang pelayanan di masyarakat ternyata tidak terbentuk, sehingga dalam pelaksanaan tugas Satlinmas kerap tidak mengetahui alur dan standar dalam pelayanan terhadap masyarakat.



### 3.2 Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satlinmas Pada Desa/Kelurahan Di Kabupaten TTS

#### 1. Meningkatkan Dana Insentif dan Biaya Operasional Satlinmas

Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan insentif dan penambahan biaya operasional kepada anggota Satlinmas sebagai salah satu bukti upaya pemerintah daerah dalam menaikan taraf hidup anggota Satlinmas yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun penerimaan dana insentif dari Satpol PP dan Biaya Operasional yang berasal pemerintah Kelurahan dan Desa dapat dilihat pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Kenaikan Dana Insentif dan Biaya Operasional Satlinmas di Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2024**

No	Tahun	Jumlah Awal	Jumlah Akhir	Kenaikan
<b>A. Dana Insentif</b>				
1	2019 – 2020	Rp. 250.000	Rp. 300.000	20%
2	2020 – 2021	Rp. 300.000	Rp. 350.000	20%
3	2021 – 2023	Rp. 350.000	Rp. 500.000	40%
<b>B. Biaya Operasional</b>				
1	2020 – 2022	Rp. 150.000	Rp.250.000	40%
2	2022 – 2024	Rp. 250.000	Rp. 350.000	40%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

#### 2. Pelatihan dan Pendidikan Dasar Disiplin Satlinmas di Kelurahan/Desa

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Satlinmas dilaksanakan oleh Bidang Linmas Satpol PP Kab. TTS beserta mitra terkait guna meningkatkan kapasitas anggota yang bertujuan untuk meningkatnya kinerja kerja satlinmas guna menaikan eksistensi di masyarakat, hal ini seharusnya dilakukan oleh Satgaslinmas namun karena tidak terbentuk maka pelaksanaan pemberdayaan Satlinmas dialihkan kepada Satpol PP bersama mitra dengan menggunakan alokasi anggaran dari Satpol PP itu sendiri. Adapun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk dari Pemberdayaan Satlinmas yang diadakan oleh Pemda Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.4**  
**Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Disiplin Anggota Satlinmas Kabupaten Timor Tengah Selatan**

No	Jenis Kegiatan	Intensitas Pertemuan	Narasumber
1	Peraturan Dasar Baris-Berbaris dan Pendidikan Dasar Disiplin Satlinmas	1 Kali	Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan
2	Lomba Sistem Keamanan Lingkungan	1 Kali	Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan
3	Jambore Satlinmas	1 Kali	Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan
4	Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran serta Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana	1 Kali	Badan Penangulungan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
5	Pelatihan Pengamanan	1 Kali	Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satlinmas memiliki peran yang sangat penting sebagai unsur penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat pada tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan (Aji, 2022) menjabarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di Kabupaten Konawe sudah berjalan dengan baik, adapun penelitian yang serupa dilakukan oleh penulis dengan lebih mengfokuskan lokasi penelitian pada kelurahan dan desa di Kabupaten TTS ditemukan berbagai masalah dan hambatan yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas belum sepenuhnya optimal dimana ditemukan adanya komunikasi yang tidak jelas dan konsisten terkait dengan kegiatan kelurahan atau desa yang disampaikan oleh satlinmas, berbeda dengan Kabupaten Konawe yang komunikasi penyampaian informasinya sudah berjalan dengan baik, adapun masalah lain terkait data personil satlinmas yang tidak pernah diperbaharui sehingga ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah pada surat keterangan dan jumlah *real* di lapangan, serta masalah anggaran yang masih minim untuk menunjang kehidupan satlinmas, sehingga kerap kali ada pekerjaan lain diluar tanggungjawab sebagai satlinmas, hal ini pada akhirnya berpengaruh pada kinerja satlinmas itu sendiri.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan analisis terkait data-data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, maupun dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas pada kelurahan/desa di Kabupaten TTS maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan Fungsi Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik dilihat dari 3 indikator yang diidentifikasi dan dinilai cukup baik, yaitu indikator sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada indikator sumber daya yang dirasa sudah memumpuni dari segi kualitas hanya saja perlunya perbaikan pada anggaran biaya serta sarana dan prasarana penunjang, selanjutnya indikator disposisi dinilai cukup baik dengan sikap loyal dan sigap yang saat ada arahan dari pimpinan namun masih harus dievaluasi terkait dengan sikap terhadap masyarakat, serta pada indikator struktur organisasi berjalan cukup baik dengan pelaksanaan SOP yang masih mengacu pada Permendagri No. 26 Tahun 2020. Salah satu indikator yang belum terpenuhi sekaligus menjadi hambatan yaitu indikator komunikasi, dimana satlinmas masih belum mampu memberikan informasi yang jelas dan sering terjadi penurunan konsistensi informasi.
2. Upaya pemerintah Kabupaten TTS dinilai sudah sangat baik dengan ada Pemberian Dana Insentif dan Biaya Operasional dari pihak Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Maupun Mitra yang melibatkan Satlinmas dalam pelaksanaannya serta Peningkatan Kapasitas yang dilakukan oleh Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Polri guna mengoptimalkan kinerja kerja Satlinmas di lapangan.

**Keterbatasan Penelitian:** Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang lebih condong kepada waktu penelitian yang sangat singkat yaitu dua minggu dengan jangkauan tempat penelitian yang jauh dari domisili tempat tinggal peneliti, hal ini dilakukan untuk membandingkan pelaksanaan tugas satlinmas yang daerahnya paling dekat dan paling jauh dari kota, sehingga observasi maupun wawancara yang dilakukan belum maksimal dan harus dibantu dengan perantaraan media komunikasi (*handphone*) untuk mendapatkan informasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work):** Penulis menyadari bahwa keberadaan Satlinmas ditengah-tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di kelurahan/desa sangatlah penting sehingga perlu adanya perhatian khusus dari Pemda Kabupaten TTS untuk dapat meningkatkan pemberdayaan Satlinmas dari segala aspek agar mampu menunjang eksistensi satlinmas dimasyarakat.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta jajarannya, Lurah Nonohonis beserta jajaran, dan Kepala Desa Nunfutu beserta jajaran yang telah mendukung penulis dengan memberikan ruang untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian berjalan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. M. (2022). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11099>
- Arifin, Z. (2012). Penelitian Pendidikan. PT. Rosdakarya.
- Bhaskara, G. D., & Mursyidah, L. (2023). Empowering Community Protection Units ( SATLINMAS ) for Ensuring Security , Peace , and Order : Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). 24, 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1341>
- Cresswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Pustaka Belajar.
- Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yayasan Mitra Netra Pustaka Pelajar.
- Gunawan. (2015). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap. Jurnal Bina Praja, 07(04), 347–359. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.347-359>
- Hamudy, M. (2014). Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, 06(04), 261–267. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.261-267>
- Kunasih, W., & Pramono, J. (2018). Optimalisasi Peran Satlinmas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 105(3), 129–133. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1922>
- Lestari, M. N. (2021). Satuan Perlindungan Masyarakat. Jurnal Konstituen, 03(02), 107–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.261-267>
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintah. ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Suparjiyanta. (2014). Dasar-Dasar Analisis Jabatan. PT. Rosdakarya.
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Wokas, G. R. (2022). Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6985>
- Yeri A, F. (2017). Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat. 5(3), 458–467. <http://www.bandungkab.go.id/arsip/tupoksi-dinas-pertanian>